

**PEMETAAN TINGKAT MUTU PENDIDIKAN PADA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh

Entoh Tohani

(Dosen Pendidikan Luar Sekolah FIP UNY)

ABSTRAK

PKBM sebagai pusat belajar berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada setiap warga masyarakat sesuai dengan patokan minimal yang ditetapkan. Patokan minimal ini telah dituangkan dalam suatu buku pedoman standar pelayanan minimal (SPM) penyelenggaraan program pendidikan PKBM. Oleh karena itu, dipandang perlu melakukan penelitian untuk menggambarkan ketecapaian mutu layanan pendidikan sesuai pedoman dimaksud. Penelitian ini dilakukan pada subyek analisis yaitu tujuh PKBM, yang ditentukan secara purposive. Penelitian ini menggunakan teknis pengumpulan data dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKBM-PKBM yang diteliti melaksanakan program-program pendidikan masih mengacu pada program-program pendidikan yang dikembangkan oleh Depdiknas, mencakup berbagai jenis program pendidikan kesetaraan, keaksaraan dan keterampilan. Kesesuaian buku panduan dengan pelaksanaan kegiatan pada aspek pelaksanaan program pendidikan, pemberian layanan informasi, jaringan kerja sama, dan pembinaan tenaga kependidikan sudah dapat dilaksanakan, namun terselenggara secara optimal. Dengan demikian upaya pengembangan pada aspek-aspek tersebut perlu dilakukan oleh semua pihak yang berkompeten.

Kata kunci: ***PKBM, Mutu Pendidikan***

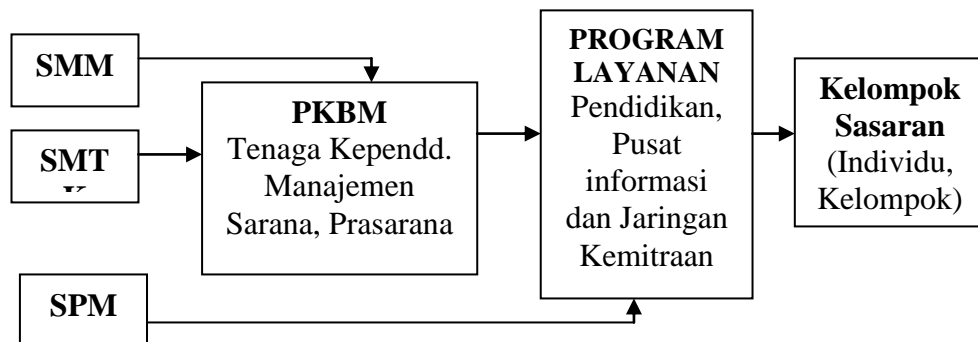
PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja PKBM sebagai sarana pembelajaran masyarakat, penyedia informasi, tempat bertukar pengetahuan, dan tempat koordinasi dalam memanfaatkan potensi-potensi masyarakat (Sihombing, 1999; Fasli Jalal & Dedi, 2000), Ditjen PLSP dalam tiga tahun terakhir ini telah memberikan hibah pada beberapa perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan, yaitu membantu memecahkan masalah-masalah teknis yang dihadapi PKBM baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi penyelenggaraan program pendidikan pada PKBM. Selain itu, Ditjen PLSP juga memberikan hibah pengembangan kegiatan kepada beberapa PKBM dengan maksud agar PKBM yang diselenggarakan itu dapat berjalan dengan baik dan menyelenggarakan program-program pembelajaran sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Respon perguruan tinggi dan masyarakat terhadap program pendampingan dan pengembangan kegiatan PKBM tersebut sangat menggembirakan terbukti dari semakin banyaknya PKBM yang didirikan dan dikembangkan baik oleh perguruan tinggi maupun oleh masyarakat. Penyelenggaraan PKBM yang dilaksanakan diikuti dengan pemberian keluasan bergerak dan mengembangkan diri supaya menjadi lembaga yang dapat mampu membelajarkan masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk memudahkan kegiatan penyelenggaraan PKBM telah dibentuk sebuah pedoman yang dijadikan acuan pelaksana program supaya lebih terarah dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Arahan diwujudkan dalam bentuk pedoman mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) PKBM. SPM PKBM diartikan sebagai ukuran minimal yang harus dipenuhi oleh para pengelola program atau kegiatan-kegiatan layanan dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan-kegiatan pendidikan luar sekolah. SPM PKBM merupakan salah satu instrumen dari manajemen program atau kegiatan PKBM yang terkait dengan Standar Minimal Manajemen (SMM), Standar Minimal Tenaga Kependidikan (SMTK). Keterkaitan antar instrumen manajemen PKBM dapat dilihat dari bagan berikut:



Gambar 1. Keterkaitan Instrumen Menejemen PKBM

Berdasarkan SPM PKBM, bidang layanan yang langsung dapat diterima oleh warga sasaran meliputi a) jenis layanan pendidikan, meliputi warga belajar mendapat layanan pembelajaran berdasarkan kurikulum, pemotivasian belajar, bahan ajar dan atau bacaan yang sesuai materi pembelajaran, pembimbingan belajar mandiri (tutorial), penilaian hasil belajar akhir lokal/nasional, dsb, b) pelayanan informasi meliputi memberikan sajian informasi tentang kegaitan PKBM pada masyarakat,

memberikan sajian informasi dari luar PKBM yang diperlukan peserta program dan masyarakat sekitar, dan c) pelayanan kemitraan mencakup melakukan kerja sama fungsional (kemitraan), dan memfasilitasi kerja sama antara warga /kelompok dengan pihak lain.

Kehadiran SPM PKBM diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memudahkan para pengelola melaksanakan fungsinya sebagai pendidik dan pengembang masyarakat melalui penyelenggaraan program-program pendidikan luar sekolah yang bermutu. Hal ini dipahami bahwa program pendidikan luar sekolah harus terus berkembang sesuai perubahan masyarakat, mampu selalu melakukan perbaikan terus menerus, perlu terwujudnya consensus dan tanggung jawab bersama dari semua pihak dan diperlukannya patokan mutu bagi lulusan program pembelajaran (Syafaruddin, 2002:37).

Dengan demikian, pelaksanaan program pendidikan di satuan pendidikan luar sekolah dalam setiap aspek-aspeknya harus senantiasa dilakukan tenaga pendidikan untuk selalu berpedoman pada ketercapaian mutu. Mutu program pendidikan diukur dengan penentuan besar kecilnya manfaat yang diperoleh oleh setiap pihak yang berkepentingan, yaitu: terciptanya manfaat eksternal dan internal. Manfaat eksternal dari program pendidikan adalah program pendidikan akan mampu memberikan kepuasan bagi pelanggan, mampu memunculkan pandangan positif masyarakat terhadap program pendidikan, dan meningkatnya partisipasi warga masyarakat. Sedangkan, manfaat internal yang diperoleh adalah pelaksanaan proses pembelajaran akan dapat dilakukan secara efektif dan efisien misalnya penggunaan metode belajar yang tepat, sarana prasana memadai, biaya lebih rasional dan sebagainya.

Pedoman atau arahan yang diwujudkan dalam SPM PKBM dimaksud idealnya terimplementasikan dalam pelaksanaan rutin penyelenggaraan program pendidikan. Terdapat harapan bahwa secara teknis penyelenggaraan dan pengelolaan PKBM itu seharusnya sesuai dan didasarkan atas buku panduan tersebut. Namun, berdasarkan pada beberapa hasil penelitian pendahuluan dalam tugas akhir mahasiswa menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan PKBM sangat bervariasi. Konsekuensinya diduga tingkat pencapaian mutu pendidikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PKBM itu juga berbeda-beda. Perbedaan dalam hal demikian, disebabkan kurangnya pemahaman PKBM terhadap Perbedaan yang terjadi dalam penyelenggaraan program pendidikan

menunjukkan berbagai bahwa keberhasilan PKBM dalam menyediakan layanan pendidikan masih belum dapat terlaksana dengan optimal sehingga memerlukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan pada PKBM.

Oleh karena hal di atas, dalam konteks penjamin mutu, penting untuk diketahui sejauhmana keberhasilan program pendampingan dan program pengembangan kegiatan PKBM tersebut dilihat dari tingkat pencapaian mutu pendidikan, khususnya dilihat dari sistem dan standar mutu pendidikan yang perlu dikembangkan secara empirik dalam kegiatan pembelajaran pendidikan luar sekolah. Sehubungan dengan hal itu, penelitian yang dilakukan ini berupaya untuk mengetahui bagaimana kondisi yang terjadi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PKBM tersebut?, dan sejauhmana kesesuaian penyelenggaraan dan pengelolaan dengan panduan yang ada dan sejauhmana pula mutu pendidikan yang diharapkan dapat tercapai?, yang tentunya temuan yang diperoleh dapat memberikan manfaat besar bagi berbagai pihak dalam pengembangan PKBM.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong,1998:3). Penelitian yang dilakukan ini berupaya untuk mendeskripsikan pelaksanaan penyelenggaraan program pendidikan yang dilaksanakan di PKBhM. Populasi penelitian ini adalah PKBM yang memperoleh hibah pendampingan dan hibah pengembangan kegiatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. PKBM yang dipilih menjadi subyek penelitian ditentukan secara bertujuan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik penganalisan data dilakukan secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai ketercapaian mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh PKBM mengacu pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) PKBM. PKBM yang diteliti difokuskan pada PKBM yang mendapat hibah dari pemerintah yaitu sebanyak 7 PKBM. Untuk lebih memahaminya, berikut ini hasil penelitian yang dapat dipaparkan terkait dengan aspek kajian penelitian

yaitu: program pendidikan, layanan informasi, kerja sama dan pembinaan tenaga kependidikan.

1. Program pendidikan

Program-program pendidikan yang diselenggarakan di PKBM-PKBM yang diteliti dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.
Program Pendidikan

No.	Nama PKBM	Program Pendidikan
1	PKBM Abadi	Program <i>Life Skills</i> (Kursus Menjahit, Pertukangan, Pertanian), Program paket B, Program paket kejar A.
2	PKBM Amrih Raharjo	Keaksaraan fungsional, Paket A setara SD, Paket B, Paket C, <i>Life Skills</i> (Keterampilan Emping Melinjo, Keterampilan Taplak Meja, Ternak Sapi).
3	PKBM Langen	PAUD, Paket B, Paket C, KBU dan Kursus
4	PKBM Bina Insani	Keaksaraan Fungsional, Paket B, Program <i>Life-Skills</i>
5	PKBM Semangat Maju	Program Paket A-KF, Paket B, Paket C, Kursus beasiswa magang, KBU dan <i>Life-Skills</i>
6	PKBM Sejahtera	Program <i>Life skills</i> (Tata Boga, Rias dan bordir), Kejar Paket B

Dari tabel di atas, nampak bahwa program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh semua PKBM jika dilihat merupakan program pendidikan yang semuanya merupakan berasal dari departemen pendidikan nasional (Depdiknas). Kurang heterogenya program pendidikan yang diselenggarakan menunjukkan bahwa pengelola belum mampu menggali dan menggunakan potensi yang tersedia di masyarakat disebabkan kurangnya penguasaan kemampuan pengelola dalam membina hubungan dengan lembaga lain. Hal ini dapat disebabkan bahwa pada umumnya penyelenggara dan pengelola PKBM berasal dari warga masyarakat yang memiliki status

sosial tertentu, dan hanya dinilai mereka memiliki kemauan dan kesanggupan untuk menyelenggarakan program pendidikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kemampuan pengelolaan PKBM perlu dilakukan supaya terwujud program pendidikan yang bervariasi sehingga kebutuhan pendidikan di masyarakat yang beragam dapat terlayani.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa penyusunan program pendidikan tersebut diawali dengan kegiatan identifikasi sumber daya dan identifikasi kebutuhan belajar. Identifikasi sumber daya dan kebutuhan belajar dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pengelola, penyelenggara, tokoh masyarakat, penilik dikmas dan calon warga belajar. Identifikasi sumber daya mencakup identifikasi terhadap sumber daya pendanaan, sumber daya manusia dan potensi fisik. Adapun identifikasi terhadap kebutuhan belajar dilakukan dengan bantuan tokoh masyarakat dalam menyediakan data sasaran program dan berperan menyampaikan informasi mengenai keberadaan program PLS sekaligus memberikan motivasi pada warganya. Melihat pentingnya peran tokoh masyarakat (pemimpin informal) dalam penyelenggaraan program PLS menunjukkan bahwa program PLS tidak lepas dari fasilitasi yang diberikan tokoh masyarakat karena mereka merupakan agent pembaharuan bagi masyarakatnya.

Pelaksanaan program pembelajaran di PKBM yang diteliti dilakukan berdasarkan kelompok-kelompok belajar sesuai dengan jenis program pendidikan. Bagi program keterampilan, kelompok belajar dibentuk berdasarkan kesamaan kebutuhan belajar, dan ada penilaian bahwa mereka kurang memiliki keterampilan. seperti di PKBM Abadi terdapat kelompok pemuda untuk program pelatihan setir mobil, dan kelompok tata rias pengantin di PKBM Sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan perlu menetapkan sasaran yang tepat sehingga tidak terjadi salah sasaran. Maka, penetapan sasaran program membutuhkan kemampuan khusus karena dalam masyarakat setiap sasaran program belum tentu memahami kebutuhan belajarnya.

Proses pembelajaran program pendidikan dilengkapi dengan ketersediaan fasilitas belajar seperti meja, kursi, peralatan praktek, kalender, buku belajar, gedung, dll baik diperoleh dengan cara meminjam, swadaya sendiri dan/atau hibah. Keadaan fasilitas-fasilitas tersebut yang terdapat di PKBM Sejahtera, Amrih raharjo, Lancen Widya Tama, Bina Insani dan Sejahtera pada umumnya semua berkondisi baik, namun masih ada fasilitas tertentu yang kondisinya kurang baik, dan penataannya kurang

mendukung proses pembelajaran. Selain menggunakan fasilitas milik PKBM sendiri, proses pembelajaran pada PKBM tertentu menggunakan rumah warga masyarakat atau tokoh masyarakat sebagai tempat belajar. Dalam praktek pembelajaran, terdapat hambatan yang ditemukan yaitu heterogenitas kemampuan akademik warga belajar khususnya pada program/materi yang bersifat akademik, modul belajar datang terlambat dan kegiatan sosial masyarakat yang mengganggu. Tindakan untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan menggunakan buku panduan yang relevan dan relokasi waktu pembelajaran.

Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pendidikan setelah warga belajar mengikuti program pendidikan sesuai waktu yang ditentukan. Evaluasi pembelajaran program pendidikan yang bersifat akademik dilakukan dengan menggunakan tes yang telah ditentukan dari departemen pendidikan nasional (Depdiknas). Hasil evaluasi digunakan untuk memotivasi warga belajar. Sedangkan, evaluasi pembelajaran program pendidikan keterampilan (*life skills*) dilakukan dengan mengadakan tes akademik dan tes praktek. Sebagai tindak lanjut dari hasil pembelajaran, warga belajar mendapatkan bantuan modal berupa uang dan/atau peralatan sehingga pengetahuan yang diperoleh mampu dijadikan bekal untuk meningkatkan kualitas hidup dan penghidupannya.

Pedoman pelaksanaan program pendidikan yang dirumuskan dalam standar minimal manajemen PKBM menggambarkan bahwa kegiatan pada aspek program pendidikan mencakup pemotivasian warga belajar, pengadaan bahan belajar pokok bagi warga belajar dan bahan pengajar pokok bagi tutor, pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian proses dan hasil belajar secara berkala. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan-kegiatan tersebut telah dilakukan walaupun tidak semua dapat terlaksana secara optimal.

2. Layanan Informasi

Pedoman standard pelayanan minimal untuk aspek layanan informasi mencakup kegiatan penyusunan dan/atau pengadaan bahan belajar dan kegiatan memberikan informasi. Dari PKBM yang diteliti mengenai pelayanan informasi dapat disajikan berikut ini:

Tabel 6.
Layanan Informasi

No.	PKBM	Pelayanan Informasi
1	PKBM Abadi	Pertemuan rutin, pameran
2	PKBM Amrih Raharjo	Pertemuan rutin, pameran
3	PKBM Langen	Pertemuan RT, leaflet
4	PKBM Insani	Laporan tertulis, surat, telepon
5	PKBM Semangat Maju	Data masyarakat
6	PKBM Sejahtera	Data masyarakat

Dari tabel di atas dapat dilihat kegiatan pelayanan informasi baik informasi yang berasal dari dalam PKBM maupun yang berasal dari luar PKBM melalui kegiatan rutin masyarakat, penggunaan media cetak berupa leaflet, telepon dan surat. Informasi berisikan jenis program, struktur organisasi, jumlah dan kualifikasi personil PKBM sehingga dapat diakses oleh setiap warga belajar dan warga masyarakat karena disajikan dalam sebuah bagan yang disediakan. Cara lain adalah dengan menyampaikan laporan kegiatan kepada petugas dikmas atau pihak lain yang terlibat. Dengan demikian walaupun melalui media yang sederhana dapat disimpulkan bahwa informasi dari PKBM dapat disampaikan kepada warga belajar dan masyarakat sekitar.

Layanan informasi yang diberikan kepada warga belajar dan masyarakat sekitar masih mengenai informasi yang mengarah pada jenis program, kurikulum, waktu pelaksanaan dan sumber daya yang digunakan. Sedangkan untuk informasi yang ditujukan untuk warga belajar dan masyarakat sekitar yang berasal dari luar PKBM tentang peluang lapangan kerja dan peluang kerja sama belum tersedia. Padahal adanya penjelasan tentang keberadaan tempat untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki warga belajar akan meningkatkan motivasi belajar warga belajar.

Pelaksanaan penyampaian informasi baik dari dalam PKBM dan dari luar PKBM dilaksanakan oleh pengelola, tokoh masyarakat dan petugas dikmas. Artinya, dalam menyebarkan informasi tentang pelaksanaan program pendidikan luar sekolah tidak dilakukan oleh petugas yang ditunjuk secara khusus tetapi dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan dalam layanan informasi telah

dilakukan dengan menggunakan media dan mekanisme yang sederhana sehingga dimungkinkan hasil yang dicapai tidak optima sehingga diperlukan berbagai upaya layanan informasi yang beragam seperti penggunaan media forum-forum tutor, media cetak, dan promosi sendiri produk-produk yang dihasilkan.

3. Penjalinan Kerja Sama

Kerja sama fungsional (kemitraan) dalam rangka peningkatan kinerja PKBM dan penenuhan kebutuhan lembaga/individu mitra dan juga untuk memfasilitasi antara warga belajar/kelompok masyarakat dengan mitra yang dilakukan oleh PKBM-PKBM yang diteliti disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.
Jaringan Kerja Sama

No.	PKBM	Mitra Kerja Sama	Bidang Kerja Sama
1	PKBM Abadi	LPK PO Bayo Bantul LPK Bina Mandiri Pemerintah Desa UNY	NST Pelatihan Supir NST Menjahit Fasilitas belajar (Gedung) Pendampingan
2	PKBM Amrih Raharjo	Pemerintah Desa UNY	Fasilitas belajar (Gedung) Pendampingan produk
3	PKBM Langen	Yuilana Joyo, Ekateks	Kursus menjahit, sablon (magang)
4	PKBM Insani	Depdiknas	-
5	PKBM Semangat Maju	<i>Lotery Club</i> , Pemerintah desa LPK Hanna SMK N IV Kodya YK	Keterampilan Fasilitasi gedung belajar Keterampilan Keterampilan
6	PKBM Sejahtera	Salon Pengantin	NST

Tabel di atas menunjukkan bahwa PKBM-PKBM yang diteliti menjalin kerja sama dengan pihak lain yaitu dengan lembaga pendidikan dan pelatihan (LPK), pemerintah desa dan lembaga pendidikan formal. Kerja sama yang dilakukan oleh semua PKBM didasarkan pada ketersediaan dana yang tersedia dan koordinasi yang baik dari PKBM dan mitra kerja sama. Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain adalah dirasakannya dana yang ada tidak memadai dan dana tersebut sering datang terlambat. Upaya untuk mengatasinya dengan melakukan koordinasi terus-menerus yang didukung oleh hubungan yang saling mengenal.

Kerja sama yang dilakukan pengelola dari semua PKBM nampak bahwa bidang kerja sama yang dilaksanakan belum menjalin kerja sama dalam rangka penyalurkan lulusan agar ditempatkan pada lapangan kerja, khususnya bagi program keterampilan dan hubungan dalam bidang memperoleh bantuan dana dari lembaga selain Depdiknas juga minim. Kerja sama dalam bidang ini dapat dilakukan dengan mengadakan unit usaha yang dikelola bersama-sama antara PKBM dan mitra kerja sama dan mengajukan usulan untuk mendapat dana dari lembaga perbankan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek kerja sama yang dilakukan oleh PKBM hanya didasarkan pada kegiatan penyediaan nara sumber teknis, penyediaan fasilitas dan pendampingan. Sedangkan kerja sama mengenai penggalangan dana dan penyaluran lulusan belum dilakukan. Ini menunjukkan perlu peningkatan jaringan kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas program pendidikan luar sekolah.

4. Pembinaan Tenaga Kependidikan

Penyelenggaraan PKBM dilakukan oleh seorang ketua pengelola, seorang pendahara, seorang sekretaris, dan tutor/NST yang jumlahnya sesuai program yang dilaksanakan. Agar kegiatan PKBM dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kegiatan yang diselenggarakan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga tenaga kependidikan yang berkompeten, maka perlu dilakukan adanya upaya pembinaan secara terprogram dan berkelanjutan. Upaya pembinaan kemampuan tenaga kependidikan yang dimiliki PKM yang diteliti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8.
Pola Pembinaan Tenaga Pendidik

No.	PKBM	Pola Pembinaan
1	PKBM Abadi	Pelatihan tutor paket, Studi banding, Pelatihan manajemen dari PT
2	PKBM Amrih Raharjo	Pelatihan tutor paket, Pelatihan manajemen dari PT, Pembinaan mandiri
3	PKBM Langen	Pelatihan tutor, Seminar swadaya
4	PKBM Bina Insani	
5	PKBM Semangat Maju	
6	PKBM Sejahtera	

Hasil yang diperoleh dari pembinaan tenaga pendidikan yaitu tenaga pendidikan yang diikutsertakan pada pelatihan tutor memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai pembelajaran pendidikan luar sekolah misalnya tutor memahami metode pembelajaran orang dewasa yang berbeda dengan belajar anak-anak. Begitu pula pelatihan manajemen yang dilaksanakan secara mandiri dan oleh perguruan tinggi telah meningkatkan kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan di PKBM. Pola peningkatan kemampuan tenaga pendidikan berupa pelaksanaan studi banding ke PKBM seperti yang dilakukan PKBM Abadi telah memberikan wawasan bagi penyelenggara untuk mencari upaya lain untuk memajukan PKBM seperti penggalangan dana dari pemerintah desa bagi tutor. Upaya lain adalah tenaga kependidikan yang ada di PKBM yang diteliti mengikuti informasi mengenai pendidikan luar sekolah dengan menghadiri seminar.

Melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh PKBM pada umumnya hanya sebagai partisipan dalam mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan yang diselenggarakan oleh lembaga lain seperti pelatihan tutor paket A dan paket B yang diselenggarakan oleh departemen pendidikan nasional. Hanya PKBM

Amrih Raharjo yang mengadakan secara mandiri pelatihan bagi tenaga pendidikannya. Peningkatan kemampuan tenaga kependidikan di PKBM selain melalui pelatihan, dan belajar sendiri, dapat juga dilakukan dengan membentuk sebuah forum komunikasi antar pengelola PKBM sebagai wahana saling tukar pengalaman dan informasi.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan tenaga pendidikan sudah dilaksanakan sebagian besar oleh PKBM yang diteliti. Namun dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut masih diselenggarakan dalam bentuk kegiatan peningkatan kemampuan yang belum bervariasi dan masih tergantung pada pihak lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan penyelenggaraan PKBM dilakukan dengan mengelola berbagai jenis program pendidikan meliputi program pendidikan kesetaraan, keaksaraan dan keterampilan. Program pendidikan yang diselenggarakan di PKBM yang diteliti tersebut masih tergantung pada Depdiknas; kedua, kesesuaian buku panduan dengan pelaksanaan kegiatan pada aspek pelaksanaan program pendidikan, pemberian layanan informasi, jaringan kerja sama, dan pembinaan tenaga kependidikan sudah dapat dilaksanakan, dan ketiga pencapaian mutu penyelenggaraan PKBM belum optimal pada kegiatan pelaksanaan program pendidikan, layanan informasi, jaringan kerja sama, dan pembinaan tenaga kependidikan.

SARAN-SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, dapat ditarik beberapa saran berikut ini:

- 1) Perlu peningkatan profesionalitas pengelola/penyelenggara agar pengelolaan PKBM dan program pendidikannya lebih efektif dan efisien,
- 2) Perlu mengembangkan usaha yang bersifat menghasilkan sumber daya sehingga memungkinkan PKBM bisa mandiri,
- 3) Perlu membentuk kelompok belajar antar praktisi pendidikan sebagai sarana saling membelajarkan,
- 4) Perlu upaya peningkatan partisipasi warga masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan untuk memajukan PKBM

DAFTAR PUSTAKA

- Fasli Jalal dan Dedi S., (2001), *Reformasi Pendidikan dalam Konsteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita.
- Moleng, Lexy J. (1998), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya
- Syafaruddin, (2002), *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*, Jakarta : Grasindo.
- Sihombing, Umberto (1999), *Pendidikan Luar Sekolah: Kini dan Masa Depan*, Jakarta: Mahkota Utama.
- Sudjana, D, (2002), *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*, Makalah disampaikan pada Rakor Persiapan dan Penyelenggaraan Backstopping PKBM. November 2003 di Solo.